

**LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU TAHUN 2021**



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi Publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Azas Pelayanan Informasi Publik Azas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mengacu pada core values ASN yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 juli 2021 yaitu “BerAKHLAK”. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Core values BerAKHLAK memiliki penjabaran lebih rinci yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan: Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti
2. Akuntabel: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3. Kompeten: Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4. Harmonis: Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5. Loyal: Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara
6. Adaptif: Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas. Bertindak proaktif
7. Kolaboratif: Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2021, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID pembantu pada bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sudah memadai untuk melaksanakan kegiatan, tetapi masih diperlukan penambahan dan pembenahan guna menunjang kelancaran operasional PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu :

1. Sarana pelayanan informasi dan ruang kerja PPID pembantu, terdiri dari :
 - a. SDM
 - b. PC/Laptop (satu unit)
 - c. Jaringan wifi internet
 - d. Meja dan kursi
 - e. Printer
2. Sarana sosialisasi dan dokumentasi cetak dan elektronik serta media sosial Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, yaitu :
 - a. Majalah Mimbar Legislatif
 - b. Instagram @dprdlampung
 - c. www.facebook.com/dprdlampung



(Majalah Mimbar Legislatif)



(Facebook DPRD Provinsi Lampung)



(Instagram DPRD Provinsi Lampung)

I. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Lampung memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Pukul 08.00- 15.30WIB, Khusus untuk hari Jumat pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08.00-16.00 WIB (Dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan Informasi di desk Informasi dibatasi jam kerjanya, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung dengan melakukan direct message (DM) instagram DPRD Provinsi Lampung ataupun melalui email : lampungdprd1@gmail.com

Kategori informasi publik yang dapat diupload dalam media sosial maupun cetak adalah berita – berita, dokumen dokumen berkaitan dengan kegiatan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Kategori informasi publik yang dikecualikan Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu:

1. Menghambat proses penegakan hukum.
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional.

II. Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan. Pemohon informasi dapat meminta penyelesaian sengketa informasi Publik melalui Komisi Informasi Daerah. Proses pelayanan sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat permintaan informasi publik yang mengajukan keberatan atas tanggapan informasi yang disampaikan oleh PPID Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Kesimpulan Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sudah terlaksana cukup baik. Tersedianya sarana penunjang pelayanan informasi berupa majalah, website, dan media sosial yang memuat informasi yang wajib disediakan serta informasi yang diumumkan secara berkala. Tidak adanya permohonan informasi publik yang ditolak karena tidak termasuk ke dalam kategori dikecualikan. Namun demikian masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk menyediakan pelayanan informasi publik yang lebih baik.

II. Saran

Saran dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelayanan informasi yang baik, maka perlu dilaksanakan bimbingan teknis di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
2. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Database Informasi
3. Penambahan SDM pengelola layanan informasi
4. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi
5. Perlu adanya anggaran khusus untuk PPID.

LAMPIRAN

Ketua DPRD Provinsi Lampung Lantik Enam Anggota PAW

DPRD Provinsi Lampung melantik enam (6) anggota pergantian antar waktu (PAW) di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin 4 Januari 2021.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay mengatakan, ada enam anggota DPRD Provinsi Lampung yang dilantik sebagai PAW.

"PAW dilakukan oleh enam anggota DPRD Provinsi, di antaranya tiga dari Fraksi PKS dan tiga dari Fraksi Golkar," ungkap Ketua DPRD Provinsi Lampung tersebut.

Legislator PDIP itu juga menjelaskan keenam PAW DPRD Provinsi Lampung ini, karena sebelumnya keenam nama yang diganti tersebut maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 lalu.

"Pada prinsipnya PAW ini, sudah sesuai peraturan dan ketentuan yang ada. Dimana anggota DPRD berhenti karena mengundurkan diri," lanjutnya.

Selain itu Mingrum menegaskan, dalam situasi pandemi COVID-19, ia meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung untuk tetap mengikuti prokes,serta memastikan masyarakat di wilayah pemilihan nya untuk selalu dihimbau agar tetap menjalankan prokes di masa pandemi ini.

Dari data yang berhasil dihimpun, enam PAW yang terdiri dari dua fraksi yaitu tiga dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tiga Partai Golongan Karya (Golkar).

Untuk Partai Golkar yaitu Ferdi Ferdian Aziz, menggantikan Musa Ahmad di daerah pemilihan (Dapil) Lampung Tengah, I Gede Jelantik menggantikan Tony Eka Candra di Dapil Lampung Selatan, dan Ali Imran (Golkar) menggantikan Azwar Hadi di Dapil Lampung Timur.

Selain itu Fraksi PKS ada Vittorio Dwison menggantikan Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim di Dapil Lampung Tengah. Lalu Zunianto menggantikan Johan Sulaiman (Dapil Pringsewu, Metro, dan Pesawaran). Terakhir ada Puji Sartono yang menggantikan Antoni Imam di Dapil Lampung Selatan.

Sedangkan dua anggota yang mengikuti kontestasi pilkada kota Bandar Lampung dari Fraksi PDIP yakni Eva Dwiana dan Tulus Purnomo Wibowo kedua Anggota DPRD tersebut tidak dilakukan PAW diketahui belum menerima SK dari Kementerian Dalam Negeri.



Mingrum Gumay Buka Acara Rakor Sosper, Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Mingrum Gumay Ketua DPRD Provinsi Lampung membuka acara Rapat Koordinasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penyebarluasan produk hukum dan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, bertempat di Hotel Novotel. Rabu (20/01/2021).

Rapat koordinasi ini dihadiri sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Koordinator sosialisasi perda dan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan, Pejabat struktural dan pegawai dilingkungan sekretariat DPRD Provinsi Lampung, serta undangan lainnya.

Pada sambutannya legislator partai PDIP itu berharap Pelaksanaan rakor sosialisasi peraturan perundang-undangan ini dapat berjalan dengan baik dan efektif guna memberikan wawasan, pengetahuan terkait teknis penyelenggaraan baik dari administrasi sampai teknis pelaksanaan dan mensosialisasikan dasar hukum yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan

“Sosialisasi perda dalam rangka penyebarluasan produk hukum daerah yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Lampung ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait produk hukum (Perda) yang telah dihasilkan pihak eksekutif dan legeslatif terkait efektivitas peraturan yang telah di buat serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap materi muatan produk hukum daerah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.”paparnya.

Berkaitan dengan program sosialisasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, politisi PDI Perjuangan ini berharap agar dapat mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai pancasila, undang-undang dasar 1945, Bhinneka tunggal ika dan NKRI.

“Sosialisasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan ini juga bertujuan guna mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah serta menghindari berkembangnya radikalisme di masyarakat” pungkasnya.



Mingrum Gumay Ketua DPRD Provinsi Lampung Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin di Lampung

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 di Provinsi Lampung. Vaksinasi tersebut dilakukan Aula Lantai 1 Gedung Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek, Bandar Lampung.

"Alhamdulillah sudah divaksin. Alhamdulillah sehat-sehat saja enggak ada masalah," ujarnya Kamis, (14/1/2021).

Legislator PDIP itu menceritakan, sebelum dilakukan vaksinasi terlebih dahulu dilalui tahap *screening* demi memastikan bukan pengidap dari 16 penyakit yang tidak diperbolehkan vaksin.

Mingrum juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 dan mengikuti arahan dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

"Yakinlah pemerintah melindungi masyarakatnya agar tidak terkena Covid-19. Setelah ini kita dilakukan observasi dan tetap melanjutkan aktivitas bekerja," ujarnya.



Elly Wahyuni Sosialisasikan Perda Tentang Pedoman Rembuk Desa

Elly Wahyuni Anggota DPRD Lampung daerah pemilihan (dapil) III yang meliputi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Metro menggelar Sosialisasi Perda 1/2016 Tentang Pedoman Rembuk Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik.

Kegiatan sosialisasi perda itu dilaksanakan di Desa bulokarto Kecamatan Gading. Menghadirkan narasumber Dosen Pasca Sarjana Universitas Lampung DR. Toto Gunarto, SE, M.Si, juga para tamu undangan, dan dari masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan sosper itu, Elly Wahyuni yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut sebagai salah satu peran dari lembaga legislatif dalam membantu pemerintah dalam mensosialisasikan setiap aturan yang telah dibuat.

“Perda-perda yang kami buat ini, kami sadar memang kurang sosialisasi, untuk itu kami mencoba membantu Pemprov Lampung dalam sosialisasi perda ini,” jelasnya.

Legislator Gerindra tersebut menambahkan “Perda ini ditetapkan agar dapat menjadi pedoman dalam setiap penyelesaian konflik yang bisa saja terjadi dimasyarakat. Tujuannya supaya semua konflik dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat,” tutupnya.

Pantauan di lapangan, kegiatan sosialisasi perda itu tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena saat ini sedang dalam pandemi Covid-19. Yakni dengan menjaga jarak dan memakai masker.



Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari Sosialisasi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos, MH, melakukan sosialisasi perda (Sosper) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).

Anggota Fraksi Golkar daerah pemilihan' Prsawaran, Pringsewu dan Metro, melakukan Sosper di Desa Podomoro Pringsewu, Selasa (26/1/2021). Sosper Nomor 3 tahun 2020, menghadirkan nara sumber Wakabid Bencana DPD Partai Golkar Lampung Helida Heliyanti.

Pada pemaparannya Legislator Golkar tersebut meminta masyarakat agar benar-benar mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Masyarakat dalam beraktivitas harus tetap memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan massa.

Untuk mencegah penularan Covid-19, Pemprov Lampung telah membuat Perda Nomor 3 tahun 2020. Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19), harus diketahui oleh masyarakat.

Helida menyampaikan, apabila melanggar Perda Nomor 3/2020' maka ada sanksi yang bakal diterima yang harus dijalani yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak sebesar Rp 1 juta rupiah bagi perorangan, bahkan setiap penanggung jawab kegiatan usaha bisa dipidana kurungan satu bulan atau denda sebesar Rp 15 juta.

Menurut Helida, tindak pidana kurungan dan denda itu dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhi tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Khusus bagi perorangan yang melanggar sebelum dikenakan sanksi kurungan atau denda ia diberi teguran secara lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, bahkan ada upaya paksa polisional dalam bentuk penjemputan paksa pelanggaran oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan pemerintah.

Sedangkan bagi penanggung jawab kegiatan atau usaha selain teguran lisan dan teguran tertulis maka bisa berupa penghentian. Sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin baru denda maksimal Rp 5 juta.

Pada Perda Nomor 3/2020 juga dijelaskan tentang penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yakni menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas, menjaga daya tahan tubuh, menerapkan protokol kesehatan yakni mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menggunakan masker saat beraktivitas, menjaga jarak (physical distancing), mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan.

Bagi dunia usaha, diwajibkan melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan, melakukan pengecekan suhu, melakukan

pembatasan jarak fisik sekurang-kurangnya satu meter, mencegah kerumunan dan menyediakan satgas pengendalian protokol kesehatan.

Ririn mengingatkan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Karena itu, masyarakat diimbau selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan.



Raden Muhammad Ismail Gelar Sosper Tentang kemandirian Pangan Di Desa Rejosari

Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Raden Muhammad Ismail (RMI), melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (SOSPERDA) No 12 Tahun 2017, tentang “KEMANDIRIAN PANGAN”, di desa Rejosari Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Pada kesempatan yang sama kegiatan ini turut menghadirkan narasumber DR. Ambya, SE., M.Si merupakan Dosen FE Unila yang merupakan pemerhati pertanian dan pangan gizi masyarakat bersama dr. Nuyen Meutia Fitri Mars.

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia selain ketersediaannya, pangan juga harus bergizi, bermutu berimbang dan aman.

“Sehingga dalam ketersediaannya dimasyarakat pangan harus bergizi dan aman untuk dikonsumsi masyarakat sehingga menghasilkan masyarakat yang sehat dan berkualitas,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung ini berharap, masyarakat dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Selain itu, ia juga mengimbau agar masyarakat membuat POKMAS (kelompok masyarakat) dalam menghasilkan ketersediaan pangannya sendiri.

“Mulai dari menanam hingga memprosesnya menjadi makan yang bermutu dan bergizi,” harapnya.

Pada acara tersebut tetap diberlakukan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19.



Fauzan Sibron dan Nasdem Berduka Atas Wafatnya Edwin Hanibal

Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung dan Sekretaris DPW Partai NasDem Lampung Fauzan Sibron merasa kehilangan atas wafatnya Edwin Hanibal. Baginya, Edwin merupakan orang yang memiliki integritas dan pendirian yang kuat.

“Beliau sosok yg memiliki integritas dan pendirian yang kuat, sebagai kader kami kehilangan sosok yang jadi panutan. Semoga beliau husnul khatimah,” jelas Fauzan.

Prosesi pemakaman Edwin Hanibal digelar dengan mengedepankan protokoler penanganan jenazah pasien Covid-19.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung periode 2008-2012 itu dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pengajaran, Kota Bandarlampung, Rabu (13/1/2021).

Mantan pengurus Dewa Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Lampung itu menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Bumiwaras, Kota Bandarlampung, Selasa (12/1/2021), sekitar pukul 20.15 Wib.

Kepergian Edwin, membawa duka bagi orang-orang yang mengenal sosoknya.

Termasuk bagi penyelenggara pemilu, dan rekan-rekannya di Partai Nasdem.

Terlebih, beberapa hari lalu Edwin masih sempat bercengkrama dengan banyak orang. Baik secara langsung maupun lewat jejaring sosial.

"Beliau sosok yang memiliki integritas dan pendirian kuat. Sebagai kader kami kehilangan sosok yang jadi panutan. Semoga beliau khusnul khatimah," ujar Fauzan Sibron.



Bimtek Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Lampung menggelar bimbingan teknis tentang pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan selama tiga hari sejak Selasa, 16-18 Februari 2021, di Novotel Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto memberi sambutan pada acara Bimbingan Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, Selasa, (16/2/2021).

Hadir pula dalam acara tersebut Sekretaris DPRD serta undangan yang telah ditentukan dengan penerapan protokol kesehatan.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan bimtek kali ini diikuti oleh seluruh anggota dan pimpinan DPRD Lampung. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing pentingnya pemahaman ideologi Pancasila.

"Setiap dua bulan satu kali baik anggota maupun pimpinan DPRD turun ke daerah masing-masing untuk menyampaikan ideologi negara yaitu Pancasila, institusi negara, dan kebinekaan negara," ujarnya.

Mingrum menyatakan hal ini penting agar pemahaman yang diberikan kepada masyarakat tidak terpecah belah. Harapannya menjadi satu tujuan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila.

"Kalau ada perbedaan pendapat diluruskan. Hadirnya DPRD itu memberikan suatu wawasan tentang kebangsaan negara dan masyarakat bernegara yang berideologi Pancasila," harapnya.

Ketua DPRD Lampung itu meyakini bahwa pemahaman yang diberikan legislator di Dapil masing-masing bisa membuat rakyat Lampung khususnya jiwa sosialnya tumbuh semakin erat.

"Yang dikedepankan rakyat sama-sama menjaga kebinekaan Indonesia. Kami yakin tidak akan terpecah belah karena suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).



Komisi II DPRD Provinsi Lampung Soroti Kelangkaan Pupuk

DPRD Provinsi Lampung mengadakan rapat guna membahas kelangkaan pupuk yang terjadi di provinsi Lampung dan mengajak pemerintah dan pabrik pupuk untuk mengusut tuntas dugaan adanya mafia pupuk di lapangan, senin (8/2/2021).

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat DPRD Lampung komisi II.

“Jika ada indikasi mafia yang menahan pupuk ini dimanapun artinya, ada disparitas perbedaan dan jika ada masalah teknis seperti administrasi itu bisa kita cari dimana pupuk itu tertahan.” Ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, tentang kelangkaan pupuk yang terjadi di Lampung saat ini dimana para petani justru kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi.

“Karena langka,akhirnya petani membeli pupuk non subsidi dengan harga dua kali lipat dari sebelumnya dan kita akan usut tuntas sampai dimana pupuk ini tertahan apakah ada pengecer nakal,distributor dan lain sebagainya yang membuat pupuk sulit di dapatkan oleh petani.” Jelasnya.

Dilain pihak,Perwakilan pupuk indonesia wilayah Lampung-Bengkulu Wiyanto menyampaikan, akan menindak tegas oknum distributor atau pengecer yang terbukti melanggar aturan dan saat ini pihaknya sedang menelusuri kendala di lapangan terkait keganjilan yang terjadi di lapangan.

“Jika ada bukti melanggar hukum kami akan ambil langkah tegas terkait penyebab petani sulit mendapatkan pupuk subsidi, kita juga akan menilai banyak kemungkinan faktor terjadi di lapangan.” tegas Wiyanto

Tentunya, untuk mendapatkan pupuk subsidi Salah satunya petani harus tergabung dalam kelompok tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Petani yang mendapatkan pupuk subsidi harus memiliki NIK dan petani memiliki lahan tidak lebih dari dua hektar.” Tutupnya.



Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Sambut Kunjungan SAF

Suwaib Amirudin foundation (SAF) sebagai lembaga penyelenggara Kongres Nasional anak desa melakukan kunjungan ke kantor DPRD Provinsi Lampung untuk meminta dukungan dan arahan dari berbagai pihak agar tujuan terkait kegiatan atau program-program yang akan di dilakukan dapat di selenggarakan, Rabu (10/2/2021).

Pertemuan yang di lakukan oleh Ketua komisi V DPRD provinsi Lampung Yanuar Irawan dengan Kongres Nasional Anak Desa guna membahas program- program yang akan di sampaikan oleh SAF.

Menurut Andri Wiguna sebagai ketua pelaksana kegiatan SAF berharap, agar DPRD Lampung sebagai lembaga legislatif dapat memonitoring dan memiliki peran yang sangat strategis dalam perumusan peraturan yang berkaitan dengan anak desa.

Ketua komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan mengapresiasi kepada SAF atas kunjungannya ke DPRD Lampung dalam rangka melaksanakan kongres anak desa.

“Insya Allah kami juga sebagai wakil rakyat akan fokus dan kita harus bersinergi dengan kelompok-kelompok yang lain supaya apa yang menjadi cita-cita atau program-program teman-teman ini bisa terwujud dengan cepat”, ujar Yanuar.



Harga Singkong Anjlok, Komisi II DPRD Lampung Ambil Langkah Cepat Untuk Menanganinya

Selain harga cabai dan kebutuhan pangan lain yang belum stabil, saat ini petani singkong pun harus merasakan anjloknya harga ubi kayu atau singkong serta langkanya pupuk, hal ini dibarengi dengan kenaikan kebutuhan pokok lainnya yang terus melonjak akibat merebaknya virus Corona.

Saat ini, Harga singkong atau ubi kayu di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung berkisar Rp500-600/Kg jauh dari harga standar yang sebelumnya 1200/ kg.

“Ya benar harga singkong sudah seminggu ini anjlok”, terang Herawati salah satu petani singkong di Lampung timur Sribuwono yang merasakan dampak dari anjloknya harga singkong.

Menanggapi harga singkong dan kebutuhan pokok lainnya yang saat ini sedang tidak stabil, Anggota DPRD komisi II Provinsi Lampung Angga Satria Pratama saat di temui di ruang BK DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa, komisi II akan segera berkordinasi kepada pihak-pihak serta dinas- dinas yang terkait.

“Jika bisa di berikan standar harga minimal tidak drop untuk para petani, karena setiap mau tanam orang butuh pupuk dan pupuk pasti hilang padahal produksi sedang tinggi-tingginya, berarti kan di bagian tengah atau distribusi nya di pertanyakan, “Ujar legislator Partai Demokrat tersebut Selasa (02/02/2021).

Anggota Komisi Bidang Perekonomian tersebut pun menambahkan, terkait harga cabai yang saat ini belum stabil bisa memanfaatkan pekarangan rumah – rumah untuk menanam cabai dan bahan pangan lainnya untuk menjadi solusi disaat harga pokok pangan sedang naik.

“Kita akan berkolaborasi dengan komisi I menanggapi masalah pupuk langka dan anjlok nya harga singkong dan akan panggil semua distributor pupuk, petani pupuk dan kelompok-kelompok perwakilan tani. Karena masalah ini takutnya nanti banyak orang yang memanfaatkan situasi seperti ini”, tutupnya.



Anggota DPRD Lampung Dapil I Laksanakan Reses Untuk Meningkatkan Kemajuan Kota Tapis Berseri

Anggota DPRD Lampung daerah pemilihan (Dapil) I Kota Bandar Lampung melakukan reses ke Pemkot Bandar Lampung, Jumat (19/2/2021).

Rombongan dipimpin oleh Ketua Tim yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Lampung Fauzan Sibron dari fraksi Partai NasDem. Kemudian Yusirwan (PAN), Kostiana (PDIP), Azwar Yakub (Golkar), AR Suparno (PDIP), Ade Utami Ibnu (PKS), Rahmat Mirzani Djausal (Gerindra) dan Budiman AS (Demokrat).

Reses diterima langsung oleh Plh Wali Kota Bandar Lampung Badri Tamam didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai hal mengenai peran fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung demi kemajuan daerah di dapil I Bandar Lampung.

Dalam pertemuan, Fauzan Sibron mengatakan selama ini pembangunan di Kota Tapis Berseri memang sudah bagus. Namun memang ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Karenanya, dia berharap ke depan bisa terjalin lebih erat koordinasi antara DPRD Lampung dan Pemkot guna menggenjot kemajuan Kota Bandar Lampung.

Sementara, Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi kinerja Pemkot yang bisa menekan penyebaran Covid-19. Artinya, penanggulangan yang dilakukan tim berjalan dibuktikan dengan bisa merubah status zona merah menjadi oranye.

“Sementara se Lampung, tingkat kematian di Bandar Lampung masih di atas 5 persen. Karenanya saya juga meminta Satgas setempat bisa memperketat regulasi terkait penerapan protocol kesehatan khususnya di tempat umum,” harapnya.

Berbagai masukan juga diberikan oleh Anggota Dapil 1 lainnya. Misalnya Azwar Yakub yang meminta agar akses jalan Ryacudu agar segera dibenahi. Kemudian Budiman AS meminta agar Pemkot bisa mempercepat penyaluran hibah yang terlambat dan mengingatkan Pemkot agar THR, Tukin, dan Tunjangan Sertifikasi jangan sampai telat dibayarkan.

Saran dari Yusirwan adalah agar Pemkot bisa fokus pada normalisasi sungai dan drainase agar tidak terjadi banjir di musim penghujan. Kemudian, Ade Ibnu Utami mengatakan sinergi pemprov dan Pemkot juga sudah berjalan di mana, keberpihakan anggaran dari provinsi ke Kota Bandar Lampung semakin lama semakin membaik.



Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil IV Lakukan Reses di Kabupaten Tanggamus

Anggota DPRD Lampung Dapil IV lakukan Reses. Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bupati Tanggamus, Senin (22/2/2021) tersebut, dipimpin Ketua rombongan yakni Mukhlis Basri dari Fraksi Gerindra, turut mendampingi Mukhlis dalam kesempatan tersebut Dadang Sumpena dari Fraksi PDIP, Yanuar Irawan Fraksi PDIP, Mirzalie fraksi Gerindra, Joko Santoso dari PAN, Azuwansyah dari PKB, Supriadi Hamzah dari Golkar, Amaluddin, SH dari Demokrat dan Heni Susilo dari PKS.

Rombongan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, Wakil Bupati AM. Syafi'i, Sekretaris Daerah Hamid Heriansyah Lubis, Asisten Bidang Pemerintah Faturrahman, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sukisno, Asisten Bidang Administrasi Jonsen Vanesa, Kepala OPD dan Kabag di Lingkungan Pemkab Tanggamus.

Mukhlis Basri Ketua rombongan reses mengatakan, bahwa kunjungannya ke Tanggamus bersama sejumlah Anggota DPRD Lampung Dapil IV yang meliputi Tanggamus , Pesisir Barat dan Lampung untuk menyerap aspirasi dari bupati Tanggamus dan sejumlah kepala OPD.

“Ini merupakan Reses pertama kami ditahun 2021. Dalam reses ini kami akan sampaikan sejumlah program kerja dari Pemprov Lampung seperti perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Tanggamus,” ujar Mukhlis Basri.

Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi dari masyarakat Tanggamus khususnya mengenai kondisi infrastruktur di Tanggamus yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Lampung. Adapun usulan yang disampaikan mulai dari kelanjutan perbaikan ruas Ulebelu, lalu jalan lintas penghubung antar kecamatan dari Kotaagung Timur hingga Kelumbayan.

“Kemudian masalah dibidang kesehatan, pendidikan,pertanian, dan agro wisata yang ada di Tanggamus kami berharap agar DPRD Provinsi Lampung bisa membantu apa yang menjadi kendala dan kekurangan sehingga menjadikan Tanggamus sebagai kabupaten maju,”ujar Dewi Handajani.

Bupati juga menyinggung mengenai kawasan industri Tanggamus (KIT) yang hingga kini belum jelas kapan realisasinya. “Kami berharap juga agar dari DPRD Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung bisa meneruskan ke pusat agar segala pembangunan, khususnya KIT yang kita harapkan dapat segera tercapai,” ungkap bupati.

Bunda Dewi sapaan akrab bupati juga mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPRD Lampung yang berasal dari Dapil IV lantaran perannya sehingga sejumlah bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung bisa turun ke Tanggamus.

“Saat ini sedang dalam proses pembangunan Puskesmas di Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulubelu, harapannya bapak dewan dapat mengakomodir untuk penempatan tenaga dokter disana sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan memadai,”pungkas Bupati.

Setelah kegiatan, kepada wartawan, Mukhlis Basri mengatakan bahwa usulan dari bupati dan kepala OPD akan dibahas bersama dengan unsur eksekutif Pemprov Lampung.

“Usulan yang disampaikan oleh ibu bupati dan jajaran akan kita tampung lalu kita rapatkan di komisi masing-masing, selanjutnya dibahas bersama gubernur Lampung dan jajaran OPD Pemprov Lampung,” pungkas mantan Sekda Tanggamus itu.



Rapat Istimewa Paripurna HUT ke-57 Provinsi Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Provinsi Lampung di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Kamis, (18/3/2021).

Rapat paripurna ini juga dihadiri Gubernur Arinal Djunaidi, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, Jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, Ketua TP PKK Riana Sari Arinal, Ketua Dharma Wanita Mamiyani dan Kepala OPD Provinsi Lampung.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumai mengatakan bahwa di momen HUT semua pihak harus bergotong royong dan bersinergi untuk meningkatkan perekonomian di Bumi Ruwai Jurai. Ia mengatakan prestasi yang sudah ada saat ini harus dipertahankan dan kedepan harus baik lagi.

"Peningkatan ekonomi kedepan harus dilakukan. Maka tingkatkan solidaritas, harmonisasi semua elemen masyarakat untuk bergotong royong di Lampung. Prinsip gotong royong meretas kemiskinan merupakan tanggungjawab kita semua," ujarnya.

Kemudian ia mengatakan saat ini pandemi covid-19 belum reda, oleh sebab itu semua pihak wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

"Tantangan yang akan dihadapi kedepan tidak lagi ringan. Apalagi ada pandemi covid-19 mempengaruhi keadaan kesehatan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Maka kita terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mensukseskan program vaksinasi untuk memutus rantai penularan covid-19," terangnya.

Bersamaan dengan peringatan HUT ke-57 Provinsi Lampung ini, DPRD Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada stakeholder dan seluruh elemen yang telah berkontribusi dan membantu mengatasi pandemi Covid-19, diantaranya kepada Kepolisian Daerah Lampung, Korem 043/Garuda Hitam, Kejaksaan Lampung, Lanal Lampung, Brigif Marinir dan TP PKK Provinsi Lampung.

Sementara itu, Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengucapkan selamat dan Dirgahayu kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Gubernur mengajak untuk menjadikan peringatan HUT ini sebagai momentum untuk terus berjuang dan berkarya, mengukir sejarah membangun masyarakat Lampung yang semakin berdaya saing dan menanamkan semangat dalam menjalani rutinitas pekerjaan setiap hari.



Fraksi di DPRD Provinsi Lampung Apresiasi Pemutihan PKB

Sejumlah Fraksi DPRD Provinsi Lampung kompak, mengapresiasi pelaksanaan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimulai pada 1 April hingga September mendatang.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung, Hanifal menyebut pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor bakal membantu pemprov dan pengendara.

Alasannya, dengan pelaksanaan itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemprov terdongkrak, sedangkan pengendara yang telat membayar pajak dibuat girang.

“Pada dasarnya kami (Fraksi demokrat) mendukung program pak Gubernur yang berdampak baik bagi masyarakat,” kata dia.

Lantaran pelaksanaan dilakukan enam bulan, legislator Demokrat ini meminta pemprov memanfaatkan momen ini dengan menjaring semua pengendara.

“Kalau putih pajak kendaraan bermotor itu, pengendara tidak perlu membayar denda pajak, sehingga hanya membayar pajak pokoknya saja, kan itu lumayan membantu pengendara, kalau itu telat membayar pajak,” ujarnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Lampung, Apriliati ikut mengapresiasi pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor, hal ini dinilai perlu dilakukan.

Mengingat, sejak pandemi covid-19 PAD pemprov ikut berdampak, bahkan, masih kata dia, dapat dikatan terjun bebas.

“Kalau PAD kita diawal pandemi tentu sangat berdampak, makanya itu pemprov diminta memaksimalkan pelaksanaan ini,” terangnya.

Sehingga PAD pemprov terdongkak dengan adanya pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Hanya saja, saat pelaksanaannya pemprov diminta mengawasi pelayanan itu jangan sampai terjadi antrian, mengingat masih ditengah situasi pandemi.

Fraksi di DPRD Provinsi Lampung Apresiasi Pemutihan PKB

Sejumlah Fraksi DPRD Provinsi Lampung kompak, mengapresiasi pelaksanaan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimulai pada 1 April hingga September mendatang.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung, Hanifal menyebut pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor bakal membantu pemprov dan pengendara.

Alasannya, dengan pelaksanaan itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemprov terdongkrak, sedangkan pengendara yang telat membayar pajak dibuat girang.

“Pada dasarnya kami (Fraksi demokrat) mendukung program pak Gubernur yang berdampak baik bagi masyarakat,” kata dia.

Lantaran pelaksanaan dilakukan enam bulan, legislator Demokrat ini meminta pemprov memanfaatkan momen ini dengan menjaring semua pengendara.

“Kalau putih pajak kendaraan bermotor itu, pengendara tidak perlu membayar denda pajak, sehingga hanya membayar pajak pokoknya saja, kan itu lumayan membantu pengendara, kalau itu telat membayar pajak,” ujarnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Lampung, Apriliati ikut mengapresiasi pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor, hal ini dinilai perlu dilakukan.

Mengingat, sejak pandemi covid-19 PAD pemprov ikut berdampak, bahkan, masih kata dia, dapat dikatan terjun bebas.

“Kalau PAD kita diawal pandemi tentu sangat berdampak, makanya itu pemprov diminta memaksimalkan pelaksanaan ini,” terangnya.

Sehingga PAD pemprov terdongkak dengan adanya pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Hanya saja, saat pelaksanaanya pemprov diminta mengawasi pelayanan itu jangan sampai terjadi antrian, mengingat masih ditengah situasi pandemi.

Lampung Pantang Sambut Pemudik, DPRD Lampung: Itu Keputusan Terbaik

Pemerintah pusat melarang masyarakat untuk mudik pada tahun 2021 mendatang guna menekan risiko penyebaran COVID-19.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengatakan keputusan pemerintah pusat adalah keputusan yang terbaik saat ini.

"Dilarang mudik adalah keputusan yang terbaik saat ini, bukan keputusan yang tidak berdasar, tapi betul-betul untuk kepentingan nasional," kata Fauzan Sibron, usai Musda ke-XIV BPD HIPMI Lampung, di Hotel Novotel, Rabu (31/03/2021).

Politisi Nasdem tersebut menuturkan keputusan pemerintah pusat untuk melarang warganya mudik tidak mengurangi tali silaturahmi. Menurutnya, untuk berkomunikasi saat ini bisa menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting.

"Kita bisa bertalisilaturahmi dengan Zoom Meeting atau video call melalui WhatsApp dan lain-lain, ini tidak mengurangi tali silaturahmi kita," katanya.

"Maka dari itu kita mengimbau saudara-saudara saya yang ada di luar Lampung untuk berdoa dan bersabar," imbuhnya.

Selain itu untuk ekonomi pada sektor pariwisata di Lampung, menurutnya bisa dinomorduakan sebab kesehatan masyarakat adalah yang utama.

"Tentu secara ekonomi memang sektor pariwisata terkendala namun ini adalah cara terbaik saat ini soal ekonomi di kemudian hari kita bisa bangkit, tapi buat apa ekonomi bangkit kesehatan masyarakat tidak menjadi penting," pungkasnya.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay Terima Laporan LKPJ Pemprov

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dalam Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (19/4/2021).

Mingrum mengatakan, bahwa naskah tersebut sudah diterima oleh DPRD Lampung dan untuk panitia khusus (Pansus) akan dibentuk mulai hari ini.

Sebelumnya, naskah LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 tersebut telah disampaikan kepada Dewan melalui surat Gubernur Lampung Nomor: 045/1248/01/2021 tanggal 29 Maret 2021.

“Untuk surat Gubernur Tanggal 21 Maret 2021 sampai ke DPRD Lampung dan pansus tanggal 15 April 2021,” ujar Mingrum.

Kemudian, kata dia, jika pembentukan pansus terhadap LKPJ tahun anggaran 2020 tersebut akan di paripurnakan kembali, jika hasilnya telah di temukan oleh team pansus .

“Hari ini juga DPRD Provinsi Lampung akan membentuk pansus, untuk mempelajari LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah tahun anggaran 2020 dan nanti hasilnya seperti apa kita sampaikan kepada publik dan akan di paripurnakan kembali, “ imbuhnya.

Gubernur Arinal juga menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah, instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memberikan kontribusinya.

“Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya buku laporan pertanggungjawaban ini,” ungkapnya.

Arinal menyebutkan penyusunan LKPJ ini telah menggunakan sistematika terbaru dengan ruang lingkup dan urutannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemudian juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, sumber data penyusunan LKPJ berasal dari OPD Provinsi Lampung yang telah melaksanakan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

“Dengan berlandaskan kepada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020,” tutupnya.



Elly Wahyuni Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Dukung Vaksinasi Bagi Lansia

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni Soegiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota untuk membantu akses vaksinasi bagi lansia.

Legislator Gerindra ini mengatakan sebagai salah satu kelompok yang rentan terpapar virus, lansia menjadi prioritas dalam pemberian vaksin Covid-19.

Sayangnya menurut Elly, pada pelaksanaannya vaksinasi bagi lansia masih jauh dari harapan. Dari total sasaran sebanyak 21,6 juta lansia, hingga 30 Maret 2021 jumlah lansia yang telah disuntik vaksin baru sekitar 1,5 juta orang.

“Salah satu hal yang menjadi kendala masih rendahnya cakupan vaksinasi bagi lansia adalah kemudahan akses ke lokasi vaksinasi. Dengan fisik yang sudah mulai menurun, lansia membutuhkan tempat vaksinasi yang mudah dekat dan mudah dijangkau,” kata Elly saat sosialisasi Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Sabtu (3/4/2021).

“Butuh komitmen dari Pemda untuk tidak hanya fokus pada penyediaan lokasi vaksinasi di pusat kota, tetapi juga hingga tingkat kecamatan dan desa”. Imbuhnya.

“Persoalannya ada pada komitmen dari Pemda terutama untuk membantu akses lansia untuk datang ke tempat vaksinasi. Kalau di kota besar ada sentra-sentra vaksinasi, tetapi harus dilihat juga kegiatan vaksinasi di kecamatan maupun pedesaan, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurut Elly tidak semua sasaran vaksinasi memiliki kondisi sosial maupun ekonomi yang sama seperti lokasi vaksinasi yang jauh, ketiadaan pendamping, dan belum lagi akses transportasi yang sulit. Kondisi ini menjadi kendala yang kemudian menghambat para lansia untuk mengikuti vaksinasi.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan gerakan bersama yang jauh lebih masif dengan melibatkan stakeholder terkait agar semakin banyak lansia yang divaksinasi.

“Harus ada kebijakan seperti satu pendamping yang membawa dua lansia akan ikut disuntik vaksin. Atau camat maupun lurah ikut terlibat untuk memobilisasi lansia,” harapnya.

Selain kemudahan akses, lanjut Elly, kepercayaan masyarakat mengikuti vaksinasi untuk melindungi dari potensi penularan Covid-19 juga harus menjadi perhatian pemerintah.

“Sebab ada kecenderungan para anak-anak para lansia ini khawatir mengikutsertakan orang tua mereka vaksinasi karena takut akan keamanan dan efektivitas vaksin. Ketakutan seperti inilah dimana kita perlu untuk terus melakukan sosialisasi,” tutupnya.

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lakukan Kunker Ke DPRD Jawa Barat

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Barat (Jabar), Selasa (6/4/2021).

Kunker anggota Komisi IV DPRD Lampung dipimpin oleh Ketua Komisi IV H. Ismet Roni, SH, MH.

Kedatangan anggota Komisi IV DPRD Lampung diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Drs. KH. Tetep Abdul Latif dan Kabag Persidangan Drs. Arif Ahmad Rifai.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan, mengucapkan banyak terimakasih kepada DPRD Jawa Barat yang sudah berkenan menerima rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.

“Kunjungan Komisi IV DPRD Lampung ke DPRD Jawa Barat dalam rangka mempelajari infrastruktur di Jawa Barat. Sehingga infrastruktur yang baik di Jawa Barat bisa menjadi catatan dan perhatian untuk Pemprov Lampung,” ungkapnya.

Dilain pihak Ketua IV DPRD Jawa Barat Drs. KH. Tetep Abdul Latif, mengucapkan selamat datang kepada rombongan anggota Komisi IV DPRD Lampung.

Ia merasa senang atas kunjungan kerja anggota DPRD Lampung. Karena itu, beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur baik apa yang sudah dilakukan di Jawa Barat dan Lampung bisa bertukar pengalaman.

Dalam pertemuan yang cukup akrab antara dua lembaga legislatif ini, diakhiri dengan tukar cinderamata antara DPRD Lampung dan DPRD Jawa Barat.



Drs. YOSE RIZAL, MH. Sosialisasi Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Dapil V

Drs. Yose Rizal, MH Anggota DPRD Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diadakan di Daerah Pemilihan V Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan.

Sosialisasi ini diadakan pada tanggal 11 April 2021 di Aula Sekolah SMAN Hangtuh Prokimal Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, diikuti oleh peserta siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas, sosialisasi ini sangat penting disosialisasikan dan ditanamkan kepada para generasi muda Sebab jika tidak dimulai sejak dini, dikhawatirkan kedepannya para penerus bangsa tersebut tidak mengerti dasar negara Indonesia.

Ada 4 Pilar yang menjadi dasar negara dan wajib diketahui oleh para generasi muda serta seluruh warga Indonesia. Diantaranya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Kegiatan ini pun sudah mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.



Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ikhwan Fadil Pastikan Pansus Singkong Bakal Dibentuk

Ketua komisi III DPRD Provinsi Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim memastikan, Pansus singkong bakal dibentuk dalam waktu dekat. Menurutnya, memang ada kendala kecil, yakni soal judul sehingga Pansus belum terlaksana.

“Fraksi-fraksi sudah berdiskusi kepada Pimpinan DPRD bahwa Pansus singkong bakal tetap dibentuk, tapi karena ada kendala soal judul maka ditunda sementara waktu. Esensinya adalah Pansus singkong bakal dibuat guna memberikan kepastian kepada para petani singkong,” ujarnya (27/04/2021).

Legislator Gerindra DPRD Lampung ini menyebut, dalam proses pembentukan Pansus singkong itu terdapat dua Fraksi yang tidak menyetujui hal tersebut.

“Ada dua Fraksi yang tidak setuju, yakni Fraksi PKB dan Golkar, untuk Fraksi yang lain sepakat tetap dilanjutkan. Selain itu, perihal judul kalau tidak meleset Tata Kelola Niaga Singkong,” terangnya.

Ia kembali menegaskan, mayoritas DPRD Lampung sepakat membentuk Pansus singkong ini adalah untuk memberikan kepastian kepada para petani. Sehingga ada regulasi yang jelas dalam mengatur tata niaga ini.

“Intinya gini, kita ingin memberikan kepastian kepada para petani, khususnya petani singkong. Sehingga regulasi yang bakal dibuat ini diyakini menjadi angin segar bagi petani singkong di Lampung. Nanti kita duduk bersama baik dengan petani dan para pengusaha. Ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian bagi para petani, apabila harga singkong kembali anjlok di kemudian hari,” tutupnya.

DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Kerja Pansus Pembahasan LHP BPK RI

DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka agenda Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus Terhadap Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung dalam laporannya tersebut menyampaikan 16 rekomendasi untuk Pemprov Lampung atas laporan keuangan atau administratif yang bermasalah selama Tahun Anggaran 2020.

Juru Bicara Pansus LHP-BPK RI DPRD Provinsi Lampung Budi Yuhanda, setelah mendalami LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2020 tersebut memang ditemukan ada beberapa permasalahan yang perlu untuk diperbaiki dan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Lampung.

“Setelah kita mendalami LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 tersebut, maka DPRD Provinsi Lampung melalui Pansus ini dan sesuai dengan fungsi pengawasannya telah memberikan 16 rekomendasi kepada Pemprov Lampung agar dapat segera diperbaiki hal apa saja yang masih menjadi permasalahan di Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 lalu agar hal tersebut tidak terjadi kembali di masa yang akan datang,” demikian dikatakan oleh Budi Yuhanda sebelum menyampaikan laporan Pansus saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Mei 2021 tersebut.



Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Temui Wali Kota Eva Dwiana

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menerima kunjungan Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Bandar Lampung di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (4/5/2021).

Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung mengunjungi Walikota Eva Dwiana dalam rangka reses DPRD Provinsi Lampung yang berlangsung 4-12 Mei.

Di antaranya Budiman (Fraksi Demokrat), Kostiana (Fraksi PDIP), Leninstan Nainggolan (Fraksi PDIP), Apriliati (Fraksi PDIP), Suparno (Fraksi PDIP), Yusirwan (Fraksi PAN), Azwar Yacub (Fraksi Golkar), Rahmat Mirzani Djausal (Fraksi Gerindra), dan Ade Ibnu Utami (Fraksi PKS).

“Mereka datang membantu dan akan memberikan masukan terkait pengelolaan Taman Gajah, Stadion Pahoman, PKOR Way Halim,” ujar Wali Kota Eva Dwiana.

Eva Dwiana berharap Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung bisa membantu menghibahkan Stadion Pahoman dari Pemerintah Provinsi Lampung ke Pemerintah Kota untuk dijadikan stadion modern. “Alhamdulillah responnya luar biasa,” katanya.

Legislator Fraksi Gerindra, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan kunjungan mereka dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah Kota dari jaring aspirasi masyarakat di bawah. Termasuk juga permasalahan-permasalahan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi.

Setiap Anggota DPRD nantinya, akan memberikan masukan sesuai bidang komisinya masing-masing. Termasuk memantau program penataan pesisir Bandar Lampung oleh Wali Kota Eva Dwiana.

“Penataan pesisir juga kita pantau, kita mengapresiasi sekali bagaimana Pemerintah Kota dengan keterbatasan APBD tidak menghalangi suatu kreatifitas, menggandeng BUMN untuk membenahi kawasan pesisir dan infrastruktur kota,” ujar Mirzani.

“Dan menurut Bunda, beliau sangat berhati-hati tidak ingin ada penggusuran tapi merapihkan, dan kita memonitoring,” tambahnya.



Ketua DPRD Mingrum Gumay Berharap Adanya Sinergi Dalam Meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat Lampung

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Provinsi Lampung, Selasa (15/6/2021).

Kegiatan dalam tema “Penguatan Peran Sisi Hulu Budaya Baca Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat” juga dirangkai dengan Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten/Kota dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Perpustakaan Nasional dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung.

Hadir sebagai narasumber Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Drs. Muhammad Syarif Bando, MM. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, SH., MH. Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, SH serta Rektor Universitas Teknokrat Dr. H. M. Nasrullah Yusuf, SE., MBA.

Dalam paparannya Mingrum Gumay mengapresiasi program pemerintah baik pusat maupun daerah guna mendukung penguatan peran sisi hulu dalam rangka meningkatkan indeks literasi masyarakat melalui fungsi DPRD (fungsi anggaran, pembentukan peraturan daerah dan pengawasan).

"Dalam upaya peningkatan indeks literasi masyarakat khususnya di Provinsi Lampung diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), perguruan tinggi, dan stakeholder dalam upaya peningkatan literasi masyarakat di Provinsi Lampung," ujar Mingrum Gumay.

Menurut Mingrum, Perda Nomor 16 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan diharapkan mendukung peningkatan indeks literasi masyarakat di Provinsi Lampung.

Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, mengajak bunda literasi di kabupaten/kota memiliki target program dapat membentuk 1 pojok baca/perpustakaan serta mendekatkan dan menyediakan bahan bacaan sampai tingkat desa dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait.

Diterangkan oleh Muhammad Syarif Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam upaya mendukung kemajuan dunia literasi di Indonesia perpustakaan nasional republik indonesia saat ini telah menambah referensi buku sebanyak 1 juta buku baru dan sangat mudah untuk di dapat karena disajikan secara digital.



Komisi V DPRD Provinsi Lampung Tanggapi Kasus Kawin Anak di Lampung Yang Meningkat

Komisi V Rapat Dengar Pendapat bersama dengan tiga lembaga civil society organizations (CSO), yakni Lada Damar Lampung, Komnas LPA Lampung, dan Yayasan Konservasi way Seputih (YKWS) di ruang komisi. Senin (14/06/2021)

Selly Fitriyani Direktur eksekutif Lada Damar Lampung, mengatakan banyaknya jumlah kasus pernikahan anak dibawah umur. Dari data yang diterima sudah terjadi 700 pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur.

“Namun dispensasi kawin anak hampir semuanya dikabulkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Harusnya Kemenag melakukan seleksi untuk dapat memilah mana yang harus dikabulkan dan mana yang tidak,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Aprilliati Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V mengatakan harus adanya sosialisasi tentang bahaya nya pernikahan anak dibawah umur.

“Jika pernikahan anak dibawah umur terjadi berkelanjutan, ini akan menimbulkan masalah-masalah baru. Baik ketika hamil ataupun ketika persalinan, dan dikhawatirkan anak yang lahir tersebut mengalami stunting karena kurangnya kesiapan dari ibu-ibu muda yang melakukan pernikahan dini,” ujar Aprilliati.

Kemudian, dari audiens yang terjadi komisi V akan mengambil upaya untuk dapat menekan angka pernikahan dini. Duduk bersama dengan dinas terkait supaya masalah ini dapat menemukan titik terangnya.

“Dari itu nantinya kita akan melakukan pemanggilan terhadap mitra kerja komisi V, seperti Dinas Perlindungan Perempuan Anak, Kementerian Agama, untuk menekan angka pernikahan dini,” pungkasnya.



Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay Hadiri Apel Kesiapan Vaksinasi Keliling bersama Polda Lampung

Polda Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh stakeholder terkait melaksanakan Apel Kesiapan Vaksinasi Covid-19 Keliling, bertempat di Lapangan Saburai-Enggal Bandar Lampung, pada Senin pagi (21/07/2021).

Dalam Apel kesiapan kegiatan vaksinasi keliling ini dihadiri Mingrum Gumay Ketua DPRD Provinsi Lampung mewakili Forkopimda, Eva Dwiana Walikota Bandar Lampung, Fahrizal Darminto Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Reihana Kadis Kesehatan Provinsi Lampung, Kepala BPBD Lampung dan Kadis Kominfotik Provinsi Lampung.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menyatakan, ” Kegiatan vaksinasi keliling merupakan sebuah inovasi guna mempercepat pelaksanaan Vaksinasi Nasional bagi masyarakat Lampung dan untuk mempermudah masyarakat yang kesulitan menjangkau tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah Lampung sangat mendukung program Polda Lampung dalam kegiatan vaksinasi keliling. Berharap masyarakat yang belum vaksin dapat mengikuti program vaksinasi yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian ini, “ terangnya.

Kapolda Lampung, Irjen Hendro Sugiarno bertindak selaku pembina apel dalam sambutannya mengatakan, vaksinasi keliling melalui mobil vaksin merupakan sebuah inovasi untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat memperoleh vaksin Covid-19.

“Mobil vaksin ada di semua Polres jajaran di Propinsi Lampung dan diwajibkan menyiapkan minimal 3 mobil atau lebih sarana kendaraan yang ada di masing-masing kesatuan. Silakan mobil-mobil ini digunakan untuk kegiatan vaksinasi di daerah-daerah, bersama-sama Pemerintah Daerah, TNI dan Polri,” ujarnya.

“Tidak usah berpikir bagaimana administrasi dan sebagainya, pakai saja, karena kita ingin berpartisipasi dan ingin agar masyarakat Lampung tetap sehat,” tegas Kapolda Lampung.

Irjen Hendro Sugiarno dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Pemerintah Daerah dan TNI/Polri yang telah melaksanakan vaksinasi dari rumah ke rumah, door to door langsung ke masyarakat.

“Saya lihat itu sangat membanggakan, karena ada kehadiran pemerintah ada kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat kita sehat,” jelas Irjen Hendro Sugiarno.

Kapolda Lampung juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada vaksinator-vaksinasi yang telah menyiapkan tenaga guna membuat masyarakat menjadi sehat.

“Semua ini agar dimaknai bahwa kita melakukan ibadah. Saya yakin semua yang kita lakukan ini adalah ibadah, dan Tuhan Yang Maha Besar, Allah Swt akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua ,” tambahnya.

Sementara Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan sangat mengapresiasi trobosan kegiatan vaksinasi keliling ini mudah-mudahan dapat mempercepat vaksinasi di Provinsi Lampung khususnya kota Bandar Lampung.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Kapolda Lampung beserta jajarannya, dengan adanya program ini sangat membantu Pemkot Bandar Lampung dalam mengerjakan target vaksinasi dan mensukseskan Vaksinasi Nasional,” tutupnya.



Fraksi PKS DPRD Lampung Gelar Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno

Fraksi PKS DPRD Lampung berkolaborasi bersama Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Lomba Baca Teks Proklamasi mirip suara Soekarno. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai rangkaian memperingati HUT Ke-76 RI.

Kerja kolaborasi antara Fraksi PKS DPRD Lampung dengan Fraksi PKS DPR RI ini dilakukan dalam upaya terus memupuk jiwa nasionalisme anak bangsa, sekaligus terus mengingatkan akan jasa besar para pahlawan dan para pendiri bangsa dan negara ini.

Pada agenda Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Sukarno ini, disediakan hadiah dengan nilai total 22,6 juta rupiah.

Di tingkat provinsi, total hadiahnya sebesar 5,6 juta rupiah dan di tingkat pusat sejumlah 17 juta rupiah.

Syarat dari lomba ini, pada tahap pertama yakni di tingkat Provinsi Lampung, peserta hanya membuat video rekaman pembacaan teks proklamasi kemudian diunggah di kanal YouTube pribadi dan link url YouTube masing-masing peserta dikirim ke panitia tingkat Provinsi melalui nomor whatsapp di 0882 – 8650 – 2309.

Sebelum link url kanal YouTube dikirim ke panitia tingkat provinsi, sebagian konten video tersebut dipublikasikan melalui jejaring media sosial masing-masing peserta.

Batas waktu pengumpulan link url tanggal 3 Agustus 2021, sedangkan pengumuman pemenang tingkat provinsi pada tanggal 9 Agustus. Untuk babak final tingkat nasional dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2021 secara daring atau online.

DPRD Dorong Pemprov Lampung Surati Presiden Minta Stok Vaksin Ditambah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendorong Pemprov Lampung untuk menyurati Presiden Jokowi agar pengiriman vaksin ke Lampung dapat ditambah.

Yanuar Irawan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung mengatakan, pengiriman vaksin dari pemerintah pusat ke Provinsi Lampung saat ini dinilai masih rendah ditengah lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19.

"Komisi V mendorong agar Gubernur Lampung menyurati Presiden untuk dapat mengirimkan vaksin lebih banyak lagi. Jika memang dibutuhkan surat dorongan dari DPRD kepada Menteri atau Presiden kita juga akan buat," katanya saat dimintai keterangan, Selasa (27/7/2021).

Politikus PDIP itu melanjutkan, antusiasme masyarakat Lampung dalam mengikuti vaksinasi perlu mendapatkan apresiasi. Namun hal tersebut tidak didukung dengan stok vaksin yang mencukupi.

"Jadi paling tidak kita minimal menerima 50 persen vaksin dari target sasaran vaksinasi di Lampung. Penanganan kita bagus maka masyarakat juga harus mendapatkan vaksinasi sebagai langkah pencegahan," imbuhnya.

Menurut Yanuar, ketimpangan suplai vaksin antara Jawa-Bali tidak hanya terjadi di Lampung saja. Padahal pemerintah pusat menargetkan pemerataan vaksinasi untuk mengejar kekebalan kelompok atau *herd immunity*.

"Salah satunya kan di Lampung ini yang mengalami kekurangan. Jadi harapan nya pemerintah pusat bisa memberikan stok yang banyak sehingga semua sasaran bisa di vaksinasi," harapnya.

Berdasarkan data terakhir dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sasaran vaksinasi di Lampung sebanyak 6.645.226 orang dan terdapat tambahan per stok 10 persen namun belum terdaftar. Sehingga Lampung memerlukan 14.619.497 dosis.

Sampai saat ini Lampung baru mendapatkan distribusi dari pemerintah pusat sebanyak 1.013.560 dosis sehingga masih kekurangan sebanyak 13.515.937 dosis.

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Tahun 2021 dengan acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Senin (16/08/2021).

Pada pidatonya Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo mengungkapkan Selama satu setengah tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi.

Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolah raga, dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi, terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas.” tutupnya.



Perkuat Layanan Kependudukan, Komisi I DPRD Lampung Geber Uji Publik Perda 1 Oktober

Komisi I DPRD Lampung menargetkan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diuji publik oleh Pansus pada 1 Oktober mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tenaga Ahli beserta PSKP (Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-Undangan) Universitas Bandar Lampung (UBL) sebagai penyaji Naskah Akademik Raperda dan OPD terkait di Ruang Komisi I DPRD Lampung, Selasa (14/9/2021).

Legislator Demokrat tersebut berkomitmen untuk dibahas secara intensif bersama Tenaga Ahli Raperda, Yusdianto dan PSKP UBL bersama Disdukcapil serta OPD terkait lainnya.

“Targetnya 1 Oktober mendatang kita sudah melakukan uji publik, sehingga kita perlu membahas secara intensif, substantif dengan tetap mengedepankan kualitas pembahasan,” ungkapnya.

Menurut Yozi Rizal, banyak masukan pada rapat perdana antara Komisi I DPRD Lampung bersama Tenaga Ahli dan PSKP UBL serta Disdukcapil Provinsi Lampung, diantaranya adalah penting kiranya menitikberatkan pada penguatan aspek pelayanan.

“Layanan digitalisasi yang perlu diperkuat, bahkan ide menggerakkan kemudahan pencatatan administrasi kependudukan secara mobile/ bergerak, agar menjangkau seluas-luasnya warga Lampung,” ungkap Anggota Fraksi Partai Demokrat Provinsi Lampung.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I, Mardani Umar menyatakan bahwa dirinya begitu sepakat dengan aspek pelayanan yang ditonjolkan sebagai muatan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

“Disamping itu, aspek keamanan data atau sekuriti administrasi kependudukan juga hal yang penting diperhatikan,” ucapnya.

Sementara, Yusdianto, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang didapuk menjadi Tenaga Ahli Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dirinya melihat jika Ketua Komisi I DPRD Lampung, punya kemauan dan komitmen yang besar dalam perbaikan administrasi kependudukan di Provinsi Lampung.

“Karena administrasi kependudukan Lampung juga harus berjaya, selain pertanian berjaya,” kata Yusdianto.

Hadir dalam RDP selain Pimpinan yakni Yozi Rizal, Mardani Umar dan Mikdar Ilyar, juga Anggota Komisi I yakni Watoni Nurdin, Ferliska Johan dan Anggota Komisi yang lain.



HUT ke-20 Demokrat, Anggota Fraksi di DPRD Lampung Berikan Lima Ribu Sembako Kepada Masyarakat

Fraksi Demokrat DPRD Lampung berencana menyalurkan lima ribu paketsembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Lampung.

Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-20 yang akan berlangsung pada (9/09/2021).

Sekretaris Fraksi Demokrat, Deni Ribowo, menjelaskan kriteria yang berhak menerima adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Misal, rumahnya terbuat dari papan. Hal ini agar penyaluran tepat sasaran.

"Bahkan tukang grab atau ojol bisa kita bantu. Karena kita suka melihat ojol sering tidur di jalan menunggu orderan," imbuh anggota Komisi V DPRD Lampung ini, Kamis (2/9/2021).

Menurut punggawa Demokrat tersebut, ini sebagai bentuk kepedulian para wakil rakyat di provinsi terhadap masyarakat Bumi Ruwa Jurai terdampak pandemi Covid-19.

Pembelian sembako ini, kata dia, merupakan hasil urunan dari semua anggota fraksi partai Demokrat.

Nantinya, setiap anggota memberikan 500 sembako. Sementara di DPRD Lampung, fraksi Demokrat memiliki 10 anggota, sehingga total mencapai lima ribu.

Ia mengatakan, rencana pembagian sembako telah sesuai dengan instruksi dan arahan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPD Demokrat Lampung M Ridho Ficardo.

DPRD Provinsi Lampung Sahkan Tiga Raperda Inisiatif Menjadi Perda

Kebijakan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan inisiatif DPRD Provinsi Lampung disahkan jadi peraturan daerah (Perda).

Tiga Raperda yang dimaksud yakni Raperda pertanian organik, Raperda penyelenggaraan Pondok Pesantren, Raperda tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Haddad, saat Rapat Paripurna, Kamis (25/11/2021).

"Keberadaan peraturan daerah ini kita harapkan dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Lampung," harapnya.

Karena memang jelas Jauharoh, pertama peraturan daerah tentang sistem pertanian organik ini keterkaitan dengan peningkatan ketahanan tanaman terhadap pestisida mengakibatkan residu dalam bahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

"Sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan untuk menggunakan sistem pertanian organik, sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Pertanian nomor No.70/Permentan/SR.140/10/2011, tentang pupuk organik, pupuk hayati," terangnya.

Selanjutnya, kata Dia terkait dengan Perda penyelenggaraan Pesantren ini salah satunya merupakan tindak implementasi undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren atau lembaran Negara Republik Indonesia.

"Untuk mewujudkan dan menjaga fungsi pesantren di daerah provinsi Lampung menjadi lembaga pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Maka diperlukan pengaturan memberikan pembinaan, pemberdayaan, pendanaan dan fasilitas oleh pemerintah daerah berdasarkan tradisi dan khas nya," jelasnya.

Kemudian imbuhnya, dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam rangka menghadapi persaingan bebas berdasarkan prinsip *good corporate governance*.

Serta berdasarkan Pasal 331 ayat 2 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang pemerintahan daerah bahwa kewenangan kepada pemerintah daerah membentuk BUMD baik berupa Perum dan Persero yang pembentukannya diatur dalam peraturan daerah.

"Adapun Raperda tentang tata kelola dibentuk, adalah agar pengelolaan BUMD wajib di-pedoman-i prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.



Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Laksanakan Kegiatan Lomba Baca Kitab Kuning

Setelah sebelumnya melaksanakan tahap penyisihan tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dari 20 November sampai dengan 26 November 2021, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung sukses menggelar Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK) Kelima Tingkat Provinsi Lampung.

Kegiatan yang digagas Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung bersama Bidang Pembangunan Umat (BPU) DPW PKS Lampung dilaksanakan Sabtu (27/11/2021), di Aula DPTW PKS Lampung dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.

Tiga orang Dewan juri yang terdiri dari Dr. KH Amirudin M.Pd. I (Ketua MUI Kota Bandarlampung), Ust Ahmad Mufti Salim, Lc, MA (Ketua DPW PKS Lampung), dan KH. Subni Asghari, M.Pd.I (Pengasuh Ponpes Fathul Mubiin) memutuskan Juara I diraih oleh Nurul Latifah dari ponpes Al Hikmah, Bandarlampung, Juara II diraih Uswatus Saadah dari ponpes Darul Mukhlisin, Tulangbawang Barat, dan Juara III diraih Nur Ainiyah dari Madrasah Diniyah Nurul Huda, Pringsewu.

”Juara satu dengan jumlah poin 91,8 diraih oleh ananda Nurul Latifah. Juara dua dengan jumlah poin 89,1 diraih oleh ananda Uswatus Saadah dan juara tiga diraih oleh ananda Nur Ainiyah dengan jumlah poin 88,4,” ucap Ketua Bidang Pembangunan Ummat PKS Lampung Deni Harnova yang mengumumkan para pemenang.

Deni menambahkan bahwa Juara I LBKK akan maju ke tingkat nasional mewakili Provinsi Lampung dan berhak menerima uang pembinaan sebesar Rp3,5 juta. Sementara juara dua meraih Rp2 juta dan juara tiga meraih uang Rp1 juta.

“Juara 1 LBKK akan mewakili Provinsi Lampung dalam LBKK Tingkat Nasional pada tanggal 8 Desember mendatang,” jelasnya.

Sebelumnya, saat membuka acara Final LBKK Tingkat Provinsi Lampung, dalam sambutannya Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi para santri agar semangat belajar dan menguasai kitab-kitab kuning.

Serta untuk mengukur kapasitas para santri di pesantren-pesantren agar termotivasi untuk terus melakukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas para santri sehingga siap dan matang saat diterjunkan ke masyarakat.

Sementara itu Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu mengatakan pelaksanaan LBKK Kelima Fraksi PKS ini diselenggarakan

sebagai sarana untuk terus memupuk tradisi keilmuan dan ilmiah kaum muslimin.

Dan juga sebagai apresiasi bagi para ulama dan santri, serta mendorong kalangan santri untuk terus memperdalam kajian kitab kuning dan mendorong generasi muda memahami ajaran Islam dari sumber asli, warisan ulama terdahulu.

Ade Utami kemudian mengenang tahun awal saat PKS melaksanakan LBKK. Pada awal penyelenggaraan banyak yang beranggapan bahwa PKS cuma mau memanfaatkan suara santri.

Tapi seiring berjalannya waktu, LBKK tetap konsisten dilaksanakan oleh PKS setiap tahunnya dan sekarang sudah masuk tahun kelima.

“Orang-orang banyak yang tidak tahu kalau di PKS sebenarnya banyak santri, itulah mengapa PKS setiap tahunnya selalu menggelar LBKK. Dan alhamdulillah bisa konsisten melaksanakannya hingga tahun kelima ini,” terangnya.

“Doakan kami untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan positif ini yang memang sebagai bagian dari apresiasi PKS terhadap ulama dan santri serta untuk terus memupuk tradisi keilmuan dan ilmiah kaum muslimin,” imbuhnya.

